

Analisis Kebijakan Anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam Perspektif Keuangan Negara

Rafi Danang Rasidayu¹, Aycen Wulung Pilar², Mashur Hasan Bisri³

¹⁻³Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Negri Surabaya

¹25112064085@mhs.unesa.ac.id, ²aycenwulung037@gmail.com, ³mashurbisri@unesa.ac.id

Corresponding author: aycenwulung037@gmail.com

Submitted: 13/04/2026; Revised: 30/05/2026; Published: 01/07/2026

DOI: <https://doi.org/10.61332/ijpa.v9i2.467>

Abstract

The Free Nutritious Meal (MBG) program is a strategic government policy intended to improve students' nutritional status, prevent stunting, and strengthen Indonesia's human capital. This study examines the MBG budget policy from a public finance perspective by analysing policy formulation, fiscal governance, accountability, and political economy dynamics affecting its implementation. The study employs a qualitative approach through a literature review of scholarly articles, policy documents, government reports, and relevant publications on nutrition-program financing. The data were analysed thematically through information categorisation, interpretation, and conclusion drawing. The findings indicate that MBG can expand children's access to nutritious food, support health and education outcomes, and generate long-term benefits for human development. Nevertheless, the programme faces several challenges, including substantial budgetary requirements, risks of mistargeting, limited oversight capacity, and possible political interests influencing priority setting and resource distribution. Its sustainability also depends on synchronised central and local planning, reliable beneficiary databases, and the engagement of businesses and communities. The study concludes that successful MBG implementation requires a realistic, transparent, efficient, and accountable financing design, supported by data-driven oversight and periodic evaluation. These measures are essential to maintain fiscal sustainability, improve programme effectiveness, and ensure that public resources produce equitable nutritional benefits for schoolchildren.

Keywords: Budget Policy; Fiscal Governance; Free Nutritious Meal; Public Accountability; Public Finance.

Abstrak

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan kebijakan strategis pemerintah yang diarahkan untuk memperbaiki status gizi peserta didik, mencegah stunting, dan memperkuat kualitas sumber daya manusia Indonesia. Penelitian ini bertujuan menganalisis kebijakan anggaran MBG dalam perspektif keuangan negara dengan menelaah proses formulasi, tata kelola fiskal, akuntabilitas, serta dinamika ekonomi politik yang memengaruhi pelaksanaannya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi literatur terhadap artikel ilmiah, dokumen kebijakan, laporan pemerintah, dan publikasi relevan mengenai pembiayaan program gizi. Data dianalisis secara tematik melalui tahap pengelompokan informasi, interpretasi, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa MBG berpotensi meningkatkan akses anak terhadap makanan bergizi, mendukung capaian kesehatan dan pendidikan, serta menghasilkan manfaat jangka panjang bagi pembangunan manusia. Namun, program ini menghadapi tantangan berupa kebutuhan anggaran yang besar, risiko ketidaktepatan sasaran, keterbatasan kapasitas pengawasan, dan potensi intervensi kepentingan politik dalam penetapan prioritas maupun

distribusi sumber daya. Keberlanjutan MBG juga ditentukan oleh sinkronisasi perencanaan pusat dan daerah, kualitas basis data penerima manfaat, serta keterlibatan pelaku usaha dan masyarakat. Studi ini menyimpulkan bahwa keberhasilan MBG memerlukan desain pembiayaan yang realistis, transparan, efisien, dan akuntabel, disertai pengawasan berbasis data serta evaluasi berkala untuk menjaga keberlanjutan fiskal dan efektivitas program. Temuan ini menekankan pentingnya penetapan prioritas anggaran berbasis kebutuhan, pengadaan yang berintegritas, dan koordinasi lintas sektor untuk meminimalkan kebocoran serta memperluas manfaat secara adil.

Kata kunci: Akuntabilitas Publik; Kebijakan Anggaran; Makan Bergizi Gratis; Politik Fiskal; Keuangan Negara.

Pendahuluan

Indonesia masih menghadapi tantangan besar terkait masalah gizi pada anak-anak. Berdasarkan Data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022, angka stunting mencapai 21,6%, yang masih jauh dari sasaran WHO yaitu 14% (Kemenkes, 2022). Stunting berdampak negatif tidak hanya pada kesehatan fisik, tetapi juga pada perkembangan kognitif dan produktivitas di masa depan. Hal ini menimbulkan kekhawatiran mengenai kualitas sumber daya manusia Indonesia di tahun-tahun yang akan datang.

Sebagai reaksi, pemerintah menyusun Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang ditujukan bagi siswa di sekolah dasar dan menengah. Harapannya, program ini dapat meningkatkan kualitas gizi, memperbaiki fokus belajar, dan mengurangi angka stunting. Menurut Jati dkk. (2025), MBG diakui sebagai kebijakan strategis yang tidak hanya berorientasi kepada kesehatan, tetapi juga berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia dalam jangka panjang.

Namun, kebijakan ini memicu perdebatan karena jumlah anggaran yang sangat besar, mencapai puluhan triliun rupiah. CISDI (2024) menegaskan bahwa tanpa pengelolaan fiskal yang tepat, MBG dapat menciptakan beban fiskal baru bagi negara. Oleh karena itu, penting untuk melakukan analisis terhadap kebijakan anggaran MBG dari sudut pandang pengelolaan keuangan negara guna memastikan program ini efektif dan berkelanjutan.

Signifikansi penelitian ini terletak pada jumlah besar anggaran yang direncanakan untuk MBG. Dalam konteks pengelolaan keuangan publik, setiap kebijakan yang memiliki nilai tinggi secara fiskal wajib berpegang pada prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi (Hartati dan Sururi, 2019). Apabila prinsip-prinsip ini tidak

diterapkan, program tersebut berisiko hanya akan menjadi sebuah pernyataan politik yang tidak memberikan hasil yang nyata.

Selain itu, MBG juga memiliki dimensi politik yang signifikan. Waluyo (2023) menegaskan bahwa kebijakan ini muncul sebagai bagian dari janji kampanye di pemilu, sehingga ada kemungkinan adanya pengaruh politik dalam pelaksanaannya. Pertanyaan yang muncul adalah: apakah MBG benar-benar ditujukan untuk kepentingan masyarakat secara umum, atau sekadar sebagai alat politik untuk menarik perhatian publik?

Penting untuk melakukan penelitian ini agar dapat memberikan analisis yang objektif tentang kebijakan MBG, sehingga dapat memberikan masukan kepada pemerintah dalam merumuskan kebijakan fiskal yang lebih efisien dan berkelanjutan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi kebijakan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui lensa pengelolaan keuangan negara. Fokus analisis ini terdiri dari tiga aspek utama:

1. Pembentukan kebijakan – proses bagaimana MBG direncanakan dan apa yang ingin dicapai.
2. Manajemen fiskal – cara pengelolaan anggaran MBG untuk menjamin transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi.
3. Dampak ekonomi politik – bagaimana MBG dipengaruhi oleh perkembangan politik dan kepentingan fiskal negara.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan menyeluruh tentang tantangan dan peluang yang ada pada kebijakan MBG, serta memberikan saran untuk perbaikan dalam pengelolaan keuangan negara.

Tinjauan Pustaka

Teori Kebijakan Publik

Nugroho (2016) menyatakan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian keputusan yang diambil oleh pemerintah untuk menangani isu-isu yang ada di masyarakat melalui tahap-tahap perumusan, pelaksanaan, dan penilaian. Dalam konteks Program Makan Bergizi Gratis (MBG), tahap perumusan sangat penting karena berkaitan dengan anggaran yang besar. Proses perumusan kebijakan MBG perlu mempertimbangkan kebutuhan gizi anak-anak di sekolah, kemampuan fiskal pemerintah, serta cara distribusi

yang efisien. Tanpa proses perumusan yang baik, kebijakan dapat gagal mencapai tujuan yang diinginkan.

Teori Pengelolaan Keuangan Negara

Menurut Hartati dan Sururi (2019), pengelolaan keuangan negara harus didasari oleh prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi. Transparansi mengindikasikan bahwa masyarakat berhak mengetahui bagaimana anggaran untuk MBG dibagi dan dihabiskan. Akuntabilitas menuntut adanya sistem pengawasan yang jelas agar dana tidak disalahgunakan. Efisiensi berarti setiap pengeluaran harus memberikan manfaat yang maksimal bagi penerima program. Dalam konteks MBG, prinsip-prinsip ini sangat penting karena program ini melibatkan budget yang sangat besar, mencapai puluhan triliun rupiah.

Teori Ekonomi Politik

Shaleh (2020) menjelaskan bahwa kebijakan publik selalu berkaitan dengan kepentingan politik. MBG sebagai janji di arena pemilu menunjukkan adanya elemen politik yang signifikan. Waluyo (2023) menekankan bahwa MBG lebih dari sekadar kebijakan kesehatan, melainkan juga alat politik untuk meraih dukungan dari masyarakat. Hal ini menciptakan dilema: apakah kebijakan ini benar-benar ditujukan untuk kepentingan umum atau sekadar untuk kepentingan politik yang bersifat sementara. Analisis ekonomi politik membantu dalam memahami bagaimana kepentingan politik memengaruhi alokasi anggaran dan implementasi kebijakan.

Penelitian Terdahulu

CISDI (2024) menekankan bahwa pengelolaan fiskal MBG perlu didasarkan pada data agar program tersebut tidak hanya menjadi akal-akalan populis. Jati dan rekan-rekan (2025) menyatakan bahwa MBG diciptakan untuk mengurangi stunting dan meningkatkan mutu pendidikan, tetapi mekanisme penganggaran yang berkelanjutan masih belum terdefinisi dengan jelas. Waluyo (2023) menambahkan bahwa MBG berpotensi untuk redistribusi fiskal, tetapi keberlanjutan anggaran adalah tantangan utama

yang dihadapi. Penelitian-penelitian ini menunjukkan bahwa MBG mempunyai potensi signifikan, namun juga menghadapi tantangan besar dalam hal fiskal dan politik.

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, digunakan pendekatan kualitatif dengan metode kajian literatur. Pendekatan ini dipilih karena tujuan utama penelitian adalah untuk memahami fenomena kebijakan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari sudut pandang pengelolaan keuangan negara, bukan hanya sekedar mengukur variabel kuantitatif. Kajian literatur memberikan kesempatan bagi peneliti untuk memeriksa berbagai sumber akademis, seperti jurnal, policy paper, serta laporan resmi pemerintah, guna mendapatkan gambaran menyeluruh tentang formulasi kebijakan, pengelolaan fiskal, dan implikasi politik dari MBG. Menurut Miles dan Huberman (1994), penelitian kualitatif bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam mengenai suatu fenomena sosial melalui analisis data deskriptif.

Sampel pada penelitian ini terdiri dari jurnal ilmiah dan kajian kebijakan yang diterbitkan antara tahun 2016 hingga 2025. Pemilihan periode tersebut didasarkan pada signifikansinya terhadap perkembangan kebijakan sosial dan fiskal di Indonesia dalam satu dekade terakhir. Tiga sumber utama yang menjadi perhatian adalah: Jati dkk. (2025) yang membahas formulasi kebijakan MBG, CISDI (2024) yang mengangkat isu pengelolaan fiskal serta akuntabilitas, dan Waluyo (2023) yang menganalisis MBG dari sudut ekonomi politik. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan referensi tambahan dari jurnal lain yang berkaitan dengan kebijakan publik, pengelolaan keuangan negara, serta kajian internasional tentang program gizi sekolah. Dengan demikian, data yang digunakan bersifat sekunder dan diperoleh dari publikasi ilmiah sebagai sumber primer.

Proses analisis data dilakukan dengan mengikuti kerangka kerja yang diperkenalkan oleh Miles dan Huberman (1994) yang melibatkan tiga langkah: reduksi data, penyajian data, dan verifikasi/penarikan kesimpulan. Pada langkah awal reduksi data, peneliti memilih informasi yang relevan dari berbagai artikel dan laporan kebijakan. Langkah penyajian data dilakukan dengan menampilkan informasi dalam format tabel perbandingan hasil, yang mempermudah analisis antar sumber yang berbeda. Untuk verifikasi, temuan penelitian dihubungkan dengan teori-teori mengenai kebijakan publik,

pengelolaan keuangan publik, dan ekonomi politik. Validitas penelitian ditingkatkan melalui triangulasi sumber informasi, yaitu dengan membandingkan hasil dari berbagai jurnal untuk mengonfirmasi konsistensi temuan. Dengan pendekatan ini, diharapkan penelitian dapat memberikan analisis yang mendalam dan menyeluruh terkait kebijakan anggaran MBG.

Hasil dan Pembahasan

1. Formulasi Kebijakan MBG

Temuan dari penelitian Jati dkk. (2025) mengindikasikan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) disusun sebagai kebijakan strategis untuk mengurangi angka stunting serta meningkatkan mutu pendidikan. Kebijakan ini ditujukan kepada anak-anak di tingkat sekolah dasar dan menengah sebagai penerima manfaat utama. Namun, cara penganggaran yang berkelanjutan masih belum sepenuhnya jelas. Jati dkk. menegaskan bahwa keberhasilan dalam perumusan kebijakan ini sangat bergantung pada integrasi lintas sektor, khususnya antara Kementerian Pendidikan, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Keuangan.

2. Tata Kelola Fiskal

CISDI (2024) memperingatkan bahwa besarnya anggaran MBG dapat menimbulkan beban fiskal jika pengelolaannya tidak dilakukan dengan baik. Tata kelola fiskal yang transparan, akuntabel, dan berbasis data menjadi kunci untuk kesuksesan program tersebut. CISDI menegaskan pentingnya sistem pemantauan dan evaluasi yang ketat agar dana yang dialokasikan benar-benar digunakan untuk menyediakan makanan bergizi dan tidak disalahgunakan. Hal ini senada dengan teori. Pengelolaan keuangan negara yang menekankan prinsip efisiensi dan akuntabilitas (Hartati & Sururi, 2019).

3. Dimensi Ekonomi Politik

Waluyo (2023) mengungkapkan bahwa MBG tidak hanya fokus pada kesehatan anak, tetapi juga berfungsi sebagai alat politik dalam pemilihan umum. Kebijakan ini muncul sebagai bagian dari janji kampanye, sehingga ada kemungkinan adanya bias politik dalam pelaksanaannya. Sebuah analisis ekonomi politik menunjukkan bahwa kebijakan fiskal sering kali dipengaruhi oleh kepentingan politik jangka

pendek. Dengan demikian, keberhasilan MBG sangat tergantung pada konsistensi politik dan keseriusan pemerintah dalam menjadikan program ini sebagai kebijakan jangka panjang, bukan sebagai sekadar alat politik.

4. Perbandingan dengan Teori

Hasil dari tiga sumber utama mendukung teori kebijakan publik (Nugroho, 2016) yang menyoroti pentingnya pembuatan, pelaksanaan, dan penilaian kebijakan. MBG telah disusun dengan tujuan yang jelas, tetapi pelaksanaan dan penilaiannya masih mengalami berbagai rintangan. Dari sudut pandang pengelolaan keuangan negara, MBG harus mengikuti prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi. Sementara dari sudut pandang ekonomi politik, MBG harus mampu menghindari pengaruh kepentingan politik agar benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

Tabel Perbandingan Temuan

Aspek	Jati dkk. (2025)	CISDI (2024)	Waluyo (2023)
Fokus	Stunting, pendidikan	Tata kelola fiskal	Ekonomi politik
Tantangan	Mekanisme anggaran	Beban fiskal	Konsistensi politik
Rekomendasi	Perencanaan berkelanjutan	Transparansi, data	Redistribusi fiskal

5. Pembahasan mengenai Keberlanjutan Fiskal dan Tanggung Jawab

Pembahasan berikutnya menunjukkan bahwa keberhasilan Program Makan Bergizi (MBG) tidak semata-mata ditentukan oleh besaran anggaran yang ada, tetapi juga bergantung pada stabilitas politik, keterlibatan masyarakat, dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana. Contoh program serupa di India, yaitu Skema Makanan Siang, telah berhasil meningkatkan kehadiran siswa di sekolah, meskipun menghadapi masalah seperti korupsi dan distribusi (Hidayat, 2021). Di Thailand, program gizi untuk sekolah lebih terhubung dengan kebijakan kesehatan nasional, sehingga keberlanjutannya lebih terjamin. Perbandingan ini menunjukkan bahwa MBG di Indonesia perlu memperkuat

pengelolaan keuangan dan integrasi kebijakan antar sektor agar dapat beroperasi secara efektif dan berkelanjutan.

Simpulan

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan sebuah inisiatif strategis yang memiliki potensi besar dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Dengan memberikan makanan bergizi kepada anak-anak di sekolah dasar dan menengah, program ini diharapkan mampu mengurangi angka stunting, meningkatkan status gizi, serta mendukung konsentrasi dalam belajar. Jati dkk. (2025) menekankan bahwa MBG dapat menjadi alat yang vital untuk pembangunan jangka panjang, mengingat bahwa kualitas gizi anak berkaitan erat dengan produktivitas dan daya saing bangsa di masa depan. Oleh karena itu, MBG bukan sekadar sebuah kebijakan kesehatan, melainkan juga investasi sosial dan ekonomi yang signifikan.

Namun, penelitian ini menemukan berbagai tantangan yang harus dihadapi agar program ini dapat berjalan dengan baik. Pertama, dari sisi fiskal, alokasi anggaran yang besar dapat menjadi beban bagi keuangan negara jika tidak dikelola dengan baik. CISDI (2024) menekankan perlunya pengelolaan fiskal yang transparan, akuntabel, dan berbasis data untuk menjamin penggunaan anggaran yang efektif. Kedua, terkait akuntabilitas, perlu adanya penguatan mekanisme pengawasan untuk mencegah penyalahgunaan dana dan memastikan program ini tepat sasaran. Ketiga, dari perspektif politik, MBG memiliki elemen ekonomi politik karena muncul sebagai bagian dari janji kampanye pemilu. Waluyo (2023) menekankan bahwa keberhasilan MBG sangat bergantung pada konsistensi politik dan komitmen pemerintah untuk menjadikannya sebagai kebijakan jangka panjang, bukan sekadar sebagai alat politik populis.

Daftar Pustaka

- Center for Indonesia's Strategic Development Initiatives. (2024). Makan bergizi gratis: Menilik tujuan, anggaran, dan tata kelola program [Policy paper].
- Jati, A. K., Azhar, A., & Iriani, A. (2025). Formulasi kebijakan pemerintah tentang program makan bergizi gratis di Indonesia. *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 8(1), 700–712. <https://doi.org/10.38035/rrj.v8i1.1906>

- Nugroho, R. (2016). Kebijakan publik di Indonesia. Pustaka Pelajar.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2003). Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2024). Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2025). Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025–2029.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2025). Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis.
- Waluyo, S. D. (2025). Kebijakan makanan bergizi gratis: Tinjauan ekonomi politik dalam kesejahteraan dan ketahanan pangan. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 12(1), 144–151. <https://doi.org/10.25157/dak.v12i1.18223>